

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan izin dan kekuatan kepada kami, sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Tahun 2013 sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Laporan ini merupakan laporan kinerja tahunan mengenai pertanggungjawaban kinerja BKPM dalam mencapai tujuan atau sasaran strategis. Laporan Akuntabilitas Kinerja ini menguraikan hal-hal pokok mengenai pengukuran pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja, membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja pelaksanaan sasaran dan program BKPM sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Selain menguraikan capaian kinerja periode Tahun 2013, Laporan Akuntabilitas Kinerja juga menyajikan informasi mengenai pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama organisasi, penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan.

Sangat disadari, kami perlu terus menyempurnakan laporan ini sehingga belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi, akuntabilitas seperti yang diharapkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Kami senantiasa berusaha dengan sekuat tenaga dan pikiran dalam melaksanakan tugas dan fungsi lembaga sesuai dengan tujuan nasional dan pengharapan dari para pemangku kepentingan. Laporan ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Berkat dukungan dan kerja keras dari seluruh jajaran pegawai dilingkungan BKPM yang telah melaksanakan kegiatan/program dan telah menunjukkan bukti kerja nyata selama Tahun 2013. Hal ini tercermin dari Laporan Akuntabilitas Kinerja, sebagai dasar untuk lebih meningkatkan kinerja dimasa mendatang, mengingat penanaman modal semakin dibutuhkan dan berperan untuk menggerakkan laju perekonomian.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan kepada semua pihak atas peran serta sehingga laporan ini dapat disusun dan diterbitkan.

Jakarta, 13 Maret 2014
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal



Mahendra Siregar

IKHTISAR EKSEKUTIF

A. Capaian Kinerja

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014, ditetapkan prioritas nasional di bidang penanaman modal adalah peningkatan iklim penanaman modal dan iklim usaha, dengan arah kebijakan nasional untuk menciptakan iklim penanaman modal yang berdaya saing dan meningkatnya realisasi penanaman modal di seluruh wilayah Indonesia.

Selanjutnya dalam Rencana Strategis (Renstra) BKPM Tahun 2010 – 2014, telah ditetapkan arah kebijakan di bidang penanaman modal yaitu:

1. Memperkuat kontribusi penanaman modal terhadap perekonomian nasional;
2. Mendorong terciptanya iklim penanaman modal yang berdaya saing, kondusif, dan responsif terhadap perubahan lingkungan lokal maupun global;
3. Mendorong kegiatan penanaman modal untuk mengatasi masalah pengangguran, meningkatkan perekonomian daerah, dan mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Dokumen Penetapan Kinerja (Penkin) BKPM Tahun Anggaran 2013 menetapkan 7 (tujuh) sasaran strategis yaitu :

1. Meningkatnya realisasi penanaman modal nasional;
2. Meningkatnya citra Indonesia sebagai negara tujuan penanaman modal yang kondusif dan minat akan potensi penanaman modal yang prospektif;
3. Meningkatnya pelayanan di bidang penanaman modal;
4. Meningkatnya iklim penanaman modal, pengembangan potensi daerah, dan pemberdayaan usaha nasional;
5. Meningkatnya perencanaan penanaman modal yang terintegrasi dan terkoordinasi;

6. Meningkatnya posisi tawar, kerjasama, dan implementasi hasil-hasil kesepakatan di bidang penanaman modal;
7. Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di BKPM serta pengadaan sarana dan prasarana aparatur BKPM yang diarahkan bagi peningkatan daya saing penanaman modal. Sedangkan indikator kinerja yang paling diutamakan adalah nilai realisasi penanaman modal yang terpantau dengan target Rp.390,3 triliun dan peningkatan nilai realisasi penanaman modal di Luar Jawa dengan target Rp.152,5 triliun dengan program peningkatan daya saing dan program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya serta program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dengan jumlah anggaran Tahun 2013 sebesar Rp.705.750.673.000,- (tujuh ratus lima miliar tujuh ratus limapuluh juta enamratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

Ringkasan prestasi capaian kinerja BKPM yang dihasilkan dari pelaksanaan program/kegiatan Tahun 2013 dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Tercapainya realisasi penanaman modal Rp.398,6 triliun lebih tinggi 2,1% dibandingkan target sebesar Rp.390,3 triliun, diartikan bahwa target kinerja telah tercapai sebesar 102,1%.

Perkembangan Pencapaian Nilai Realisasi Investasi Tahun 2010-2013

Investasi	2010		2011		2012		2013		Total 2010-2013	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
PMDN	60,6	60,5	67,2	76,0	79,4	92,2	117,7	128,2	324,9	356,9
PMA	147,9	148,0	172,8	175,3	204,1	221,0	272,6	270,4	797,4	814,7
Total	208,5	208,5	240,0	251,3	283,5	313,2	390,3	398,6	1122,3	1171,6

2. Tercapainya realisasi penanaman modal di Luar Jawa Rp.168,3 triliun lebih tinggi 10,4% dibandingkan target sebesar Rp.152,5 triliun, diartikan bahwa target kinerja telah tercapai sebesar 110,4%. Peningkatan investasi tersebut mencerminkan

penyebaran investasi tidak terfokus di Pulau Jawa. Apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada Tahun 2012 sebesar Rp 137,6 triliun, terjadi peningkatan realisasi investasi di luar Pulau Jawa sebesar 22,3%.

3. Tercapainya realisasi jumlah daerah yang menerapkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dengan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) sesuai target 50 Kabupaten/Kota.

4. Kinerja Keuangan

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasi, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2013. Realisasi Belanja pada Tahun Anggaran 2013 adalah sebesar Rp.593.832.388.536,- atau mencapai 84,14% dari alokasi anggaran BKPM sebesar Rp.705.750.673.000,-. Realisasi anggaran menurut program kerja diuraikan sebagai berikut :

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja menurut Program TA 2013

Kode	Uraian Program	Anggaran (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	%	Kategori
065.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKPM	202.509.378.000	152.626.742.855	75.37	Cukup
065.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BKPM	50.560.657.000	43.620.628.026	86.27	Baik
065.01.06	Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal	452.680.638.000	397.608.902.655	87.83	Baik
Jumlah		705.750.673.000	593.832.388.536	84.14	Baik

B. Permasalahan

Dalam melaksanakan pencapaian berbagai program dan kegiatan, masih ditemui beberapa permasalahan dan kendala, antara lain:

1. Permasalahan dan kendala eksternal

- a. Belum semua provinsi dan kabupaten/kota memiliki Rencana Umum Tata Ruang/Rencana Umum Tata Ruang Wilayah (RUTR/RUTW) yang mengakomodasi alokasi lahan untuk pengembangan investasi di daerah.
 - b. Masih terdapat tumpang tindih pemberian izin pemerintah daerah terkait penanaman modal.
 - c. Pembebasan lahan serta proses sertifikasi lahan yang telah dibebaskan masih menjadi kendala utama percepatan pembangunan infrastruktur, industri dan pertanian.
 - d. Perangkat daerah provinsi /Kabupaten/Kota penanaman modal (PDPPM dan PDKPM) maupun perusahaan PMDN/PMA sebagian besar masih belum tersosialisasi mengenai Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) online sehingga masih banyak perusahaan yang menyampaikan LKPM secara manual yaitu dengan mengirimkan LKPM melalui tata usaha, faximile dan surat elektronik atau E-mail.
2. Permasalahan dan kendala internal
- a. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang ditugaskan untuk menangani pemantauan realisasi penanaman modal yang menyebabkan kegiatan pemantauan kurang maksimal dalam menjangkau seluruh penanam modal (PMDN/PMA) di Kabupaten/Kota di Indonesia.
 - b. Keterbatasan SDM yang ditugaskan untuk menangani pelayanan aplikasi, perizinan dan fasilitas penanaman modal yang menyebabkan kegiatan pelayanan tersebut melebihi jam kerja, mengingat volume layanan dari hari kehari semakin meningkat.
 - c. Tidak tercapainya indikator kinerja utama tingkat *awereness* pemirsa iklan BKPM di media TV internasional hanya sebesar 61% sedangkan target 70%. Berdasarkan hasil evaluasi dikarenakan bukan karena tingkat mutu iklan dan
-

substansinya yang rendah, namun dikarenakan adanya kesulitan faktor pengukuran tingkat *awereness*.

C. Tindak lanjut

1. Proses *review Bilateral Investment Treaty* (BIT)

Kegiatan keikutsertaan BKPM dalam kerjasama Internasional di bidang penanaman modal. Pada lingkup kerjasama bilateral telah dilakukan perundingan/pertemuan konsultasi kerjasama dalam kerangka *Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA)* antara lain dengan negara EFTA (Swiss, Norwegia, Islandia dan Liechtenstein), Korea Selatan, Australia dan Uni Eropa. Adapun pertemuan perundingan P4M (Perjanjian Peningkatan dan Perlindungan Penanaman Modal) belum dilaksanakan kembali, mengingat sedang dilakukannya proses review terhadap seluruh P4M RI-Negara Mitra sesuai dengan arahan Bapak Wakil Presiden, BKPM mengusulkan BIT dilakukan moratorium sambil mempersiapkan *template* bentuk perjanjian yang menguntungkan kepentingan Indonesia.

2. Untuk mengoptimalkan pencapaian sasaran di tahun yang akan datang, masih perlu dilakukan koordinasi yang lebih intensif dengan Kementerian/Lembaga terkait, Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota), perguruan tinggi, lembaga penelitian, lembaga hukum, asosiasi profesi/sector usaha dan dunia usaha untuk menghasilkan kajian dan rumusan kebijakan penanaman modal nasional yang lebih komprehensif.
3. Rencana aksi penyusunan rekomendasi kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan perizinan penanaman modal.
4. Dalam upaya meningkatkan promosi indikator kinerja utama tingkat *awereness* pada tahun 2014 dipersyaratkan bahwa setiap penayangan di TV media internasional dalam pengadaannya harus disertakan dengan pelaksanaan survei

tingkat *awereness* pemirsa luar negeri terhadap iklan BKPM oleh lembaga survei internasional dengan tujuan dapat mencapai target tingkat *awereness* 70%.

5. BKPM dalam menghadapi persaingan semakin ketat dalam menarik investasi, ditempuh langkah-langkah untuk mensiasati pencapaian standar internasional dalam bidang layanan investasi yaitu harus meningkatkan kinerja mutu melalui perbaikan yang berkesinambungan, meningkatkan daya saing dan *image* produk layanan. BKPM dinilai telah mampu menghasilkan produk/jasa layanan yang memenuhi syarat standar pelayanan internasional yang diinginkan serta telah berhasil menerapkan system manajemen mutu SNI ISO 9001-2008 "*Quality Manajemen System Requirements*" dari Lembaga Akreditasi *Sucofindo International Certification Services* pada tanggal 28 Oktober 2013. Dalam penerapan layanan untuk tahun-tahun mendatang tetap diadakan monitoring dan evaluasi untuk mempertahankan dan selalu berupaya meningkatkan nilai mutu SNI ISO 9001-2008.
6. Dalam rangka melaksanakan rekomendasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/3779/M.PAN-RB/11/2013 tanggal 22 November 2013 perihal Hasil Evaluasi dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, BKPM melakukan upaya sebagai berikut :
 - a. Mengadakan sosialisasi arahan kebijakan penanaman modal dan penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi (RUPMP) dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota (RUPMK). Dalam tahun 2013, terdapat 11 (sebelas) dokumen RUPMP/RUPMK, terdiri dari 3 (tiga) Provinsi yang sudah memiliki dokumen Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi (RUPMP), 3 (tiga) Provinsi telah menyusun draft RUPMP, 2 (dua) Kabupaten telah menyusun RUPMK, dan 3 (tiga) Kabupaten/Kota telah menyusun draft RUPMK.

- b. Melakukan reviu penetapan kinerja, reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) dan reviu Rencana Strategis BKPM. Hasil dari reviu tersebut, BKPM dalam Tahun 2014 akan menjadi dasar pelaksanaan kegiatan dan penyusunan Rencana Strategis BKPM Tahun 2015 – 2019. Melakukan pemantauan oleh Tim Khusus yang diberi tugas untuk melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dimana salah satu tugasnya adalah melakukan monitoring dan evaluasi data kinerja unit-unit kerja di lingkungan BKPM.
- c. Melaksanakan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang mulai diterapkan dalam Tahun 2013 dan tahun-tahun mendatang. Dengan tujuan kinerja pegawai BKPM akan terukur.
- d. Menyajikan informasi kinerja dalam LAKIP unit kerja melalui evaluasi dan analisis serta perbandingan dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya. Hal tersebut dapat dilihat di dalam LAKIP Unit Kerja Eselon I dan Eselon II (Mandiri) Tahun 2013. Sistem penyajian informasi kinerja ini masih dalam proses penyempurnaan lebih lanjut yang akan dilakukan dalam Tahun 2014.
- e. Meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja di lingkungan BKPM. Dalam rangka meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja, BKPM bekerjasama dengan BPKP melakukan pelatihan dan simulasi pelaksanaan evaluasi kinerja kepada APIP dan kepada Anggota Tim Khusus Monitoring dan Pengumpulan Data Kinerja unit kerja di lingkungan BKPM. Melalui pelatihan tersebut, diharapkan kualitas SDM evaluator meningkat.
- f. Meningkatkan manajemen kinerja melalui penyusunan perencanaan kinerja yang berorientasi hasil, kemudian melakukan pengukuran atas apa yang direncanakan, melaporkan realisasi kinerja dan melakukan evaluasi atas akuntabilitas kinerja serta memanfaatkan seluruh proses tersebut dalam pengambilan keputusan. Proses manajemen kinerja di lingkungan BKPM telah

dilakukan beberapa kegiatan secara elektronik yaitu dengan menggunakan teknologi informasi (IT) terkini. Walaupun demikian, terhadap penggunaan IT tersebut BKPM secara terus menerus melakukan evaluasi dan pengembangan sehingga manajemen dapat dilaksanakan dengan akurat, transparan, efisien dan efektif.

- g. Meningkatkan kapasitas SDM dalam bidang akuntabilitas dan manajemen kinerja di seluruh jajaran BKPM untuk mempercepat terwujudnya yang berkinerja dan akuntabel. Dalam Tahun 2013, BKPM melakukan upaya peningkatan kualitas SDM melalui berbagai pelatihan baik teknis maupun penjenjangan. Pelatihan tersebut dilakukan juga kepada aparatur instansi penanaman modal di daerah (provinsi/kabupaten/kota), dalam rangka untuk kesamaan norma, standar, prosedur dan kriteria penanaman modal.
7. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014, peningkatan Penanaman Modal merupakan prioritas dalam agenda untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyederhanaan prosedur penanaman modal, penciptaan kepastian hukum termasuk penyusunan rekomendasi kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan perizinan penanaman modal baik di Pusat maupun di Daerah, penyempurnaan kelembagaan penanaman modal yang berdaya saing, efisien, transparan dan non diskriminatif; serta penciptaan insentif penanaman modal. Disamping itu Pengembangan sistem informasi penanaman modal dan mendorong, memperkuat serta meningkatkan penanaman modal dalam negeri.

Jakarta, 13 Maret 2014
Badan Koordinasi Penanaman Modal

LAMPIRAN :
PENGUKURAN KINERJA SASARAN
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
TAHUN 2013

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2013	REALISASI	%	KATEGORI
1.	Meningkatnya realisasi penanaman modal nasional yang berorientasi pada kegiatan pembinaan, pengawasan, dan pemantauan penanaman modal	1.1. Nilai realisasi penanaman modal	Rp 390,3 triliun	Rp.398,6 triliun	102,1	Sangat baik
		1.2. Penyebaran penanaman modal keluar Jawa	Rp152,5 triliun	Rp. 168,3 triliun	110,4	Sangat baik
		1.3. Capaian nilai realisasi PMDN terhadap target	Rp 117,7 triliun	Rp.128,2 triliun	108,88	Sangat Baik
		1.4. Capaian nilai realisasi PMA terhadap target	Rp 272,6 triliun	Rp 270,4 triliun	99,19	Baik
2.	Meningkatnya minat penanaman modal melalui efektivitas kegiatan promosi yang tepat sasaran	2.1. Tingkat <i>awareness</i> pemirsa iklan BKPM di TV media internasional	70	61	87,14	Baik
		2.2. Jumlah minat investasi yang dicatat melalui berbagai kegiatan (MII, TTI, GPID, Pameran, Kunjungan/Misi Investasi, IIPC, IRU, FO, <i>Help Desk</i> BKPM)	12.000 minat penanaman modal	14.946 minat penanaman modal	124,0	Sangat baik
3.	Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal yang berorientasi pada peningkatan daya saing	3.1. Waktu penyelesaian pelayanan penanaman modal sesuai dengan SOP berupa :				
		a. Izin Prinsip Penanaman Modal	3 hari	3,10 hari	96,77	Baik
		b. Izin Usaha	7 hari	5,67 hari	123,46	Sangat baik
		c. Surat Persetujuan Fasilitas	7 hari	7,17 hari	97,63	Baik
		3.2. Perizinan dan non perizinan yang diterbitkan	6.820 perizinan	15.744 perizinan	230,85	Sangat baik
3.3. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap kualitas pelayanan	75 dari skala 100 (3 dari skala 4)	3,264	108,80	Sangat baik		

		penanaman modal				
		3.4. Survei Integritas KPK	Peringkat 5 besar	4	125,00	Sangat baik
4.	Meningkatnya kualitas iklim penanaman modal, pengembangan potensi daerah, dan pemberdayaan usaha nasional	4.1. Jumlah daerah yang menerapkan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) dan perizinan penanaman modal secara elektronik (SPIPISE)	50 Kab/Kota	50	100	Sangat baik
		4.2. Indeks kemudahan berusaha (<i>Ease of doing business</i>)	A.T Kearney Peringkat 20	9	222,22	Sangat baik
		4.3. Indeks daya saing	peringkat Ba1 BB+ BB+	Baa3 BBB- BB+	Investment grade	Sangat baik
		4.4. Peringkat Negara Indonesia dibidang penanaman modal	WEF peringkat 44	46	95,65	Baik
5.	Meningkatnya kualitas perencanaan penanaman modal yang berorientasi pada peningkatan daya saing	Jumlah daerah yang telah memiliki dokumen perencanaan penanaman modal (Renstra/RUPMP/K)	10 Provinsi/ Kabupaten/ Kota	11 Provinsi/ Kabupaten/ Kota	110	Sangat baik
6.	Meningkatnya kerjasama penanaman modal	Jumlah hasil perundingan kerjasama penanaman modal	129 dokumen hasil perundingan	162 dokumen hasil perundingan	126	Sangat baik
7.	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	7.1. Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Terpenuhi	Baik
		7.2. Kategori Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	Peringkat "B"	Peringkat "B"	Terpenuhi	Baik

Jumlah Anggaran Tahun 2013 = Rp 705.750.673.000,0 (100,00 %)
 Jumlah Realisasi Anggaran Tahun 2013 = Rp 593.832.388.536,0 (84,14 %)
 Sisa Anggaran = Rp 111.918.284.464,0 (15,86 %)